



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BANTUAN

PENYERAHAN BANTUAN: Pengukuhan kelompok tani dan penyerahan berbagai bantuan alsintan, mulai traktor roda empat, rotary, transplanter, hingga hand sprayer serta penyaluran simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Tebu Bank Jatim, menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi tebu.

Komitmen Ketahanan Pangan, Pemkab Serahkan Alsintan dan KUR Tebu

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menegaskan komitmenya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi, saat menghadiri kegiatan pengukuhan ketahanan pangan yang digelar di Gedung Per pertemuan PG Candi Baru, beberapa waktu lalu.

Subandi menegaskan bahwa pengukuhan kelompok tani, penyerahan berbagai bantuan alsintan mulai traktor roda empat, rotary, transplanter, hingga hand sprayer serta penyaluran simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Tebu Bank Jatim, menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong peningkatan produksi tebu.

Tak hanya itu, sosialisasi program Bongkar Ratoon 2025/2026

juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan sektor pertanian. "Dengan kelompok tani yang solid dan didukung teknologi pertanian, produksi tebu akan meningkat, efisiensi kerja bertambah, dan kesejahteraan petani bisa naik," ujar Subandi.

Ia juga mengingatkan seluruh kelompok tani agar merawat alsintan yang diterima melalui anggaran APBN. Menurutnya, alat tersebut harus dijaga maksimal agar manfaatnya tidak hilang. "Bapak/Ibu semua sudah menerima alat. Jangan sampai tidak dirawat. Sanggup nggih?" ucap Subandi.

Bupati Subandi turut memberi apresiasi kepada Bank Jatim atas penyaluran KUR Khusus Tebu dengan bunga rendah 6 persen dan tenor satu tahun yang disesuaikan

masa panen. Ia berharap fasilitas pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab. "Kalau sudah panen, kewajibannya harus dikembalikan. Pemerintah sudah mempermudah akses, tinggal digunakan dengan baik," pesannya.

Lebih lanjut, kerja sama Pemkab Sidoarjo dengan Bank Jatim disebut sebagai langkah untuk menekan praktik pinjaman rentenir yang selama ini membebani petani. Subandi mengungkapkan bahwa lebih dari 12.000 petani dan nelayan di Sidoarjo telah masuk dalam program asuransi pemerintah daerah.

"Kalau ada petani terdampak banjir atau masalah di pekerjaan, akan kita bantu. Modal yang hilang tetap diganti agar mereka bisa kembali berproduksi," tegasnya. (udi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Bupati Subandi saat sidak proyek di Desa Trosobo Kecamatan Taman, Minggu (14/12).

Bupati Subandi: Proyek Tepat Waktu Lebih Penting dari Denda

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi terus memantau sejumlah proyek pembangunan di Kota Delta jelang akhir tahun. Ia sidak untuk memastikan proyek bisa rampung tepat waktu.

Subandi melakukan sidak ke dua proyek di kawasan Kecamatan Taman, Minggu (14/12). Yakni proyek Betonisasi Jalan Desa Bringinbendo dan Proyek jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo.

Di proyek Betonisasi Bringinbendo, Subandi menemukan

keterlambatan dengan deviasi 22 persen. Padahal sisa waktu penggerjaan tinggal 13 hari.

Sedangkan saat sidak proyek di Desa Trosobo, ia menemukan keterlambatan dengan deviasi 20% dan sisa waktu penggerjaan kurang dari 7 hari.

Subandi menyayangkan masih ditemukannya deviasi pada sejumlah proyek infrastruktur. Ia menegaskan keterlambatan pekerjaan akan berdampak pada kontraktor, khususnya terkait sanksi denda jika proyek

tidak selesai tepat waktu.

"Kalau tidak tepat waktu, kasihan juga para kontraktor karena harus membayar denda. Yang terpenting bagi kami bukan menerima denda, tetapi pekerjaan selesai sesuai jadwal," tegasnya.

Karena itu, ia menekankan ketepatan waktu penggerjaan sangat penting agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar proyek. Jika proyek selesai tepat waktu, roda perekonomian dapat terus berjalan tanpa hambatan. (sta/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDAK INFRASTRUKTUR DI BRINGINBENDO DAN TROSODO TEMUKAN DEVIASI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Mendekati akhir tahun, Bupati Sidoarjo Subandi terus memantau proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Berusaha melihat langsung untuk memastikan proyek berjalan sebagaimana diharapkan, dan selesai tepat waktu.

Seperi yang dilakukan di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Minggu (14/12/2025). Bupati Subandi turun melakukan sidak untuk melihat proyek betonisasi jalan dan pembangunan jembatan crossing saluran air yang ada di sana.

Dalam sidak betonisasi di Desa Bringinbendo, Bupati mendapat adanya keterlambatan pembangunan dengan deviasi mencapai 22% dari target. Padahal sisa waktu penggerjaan tinggal 13 hari lagi.

Sementara saat melakukan sidak terhadap proyek pembangunan jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo, Bupati Subandi



juga menemukan keterlambatan dengan deviasi 20% dan sisa waktu penggerjaan kurang dari 7 hari.

Dari hasil evaluasi di lapangan, keterlambatan pada kedua proyek tersebut disebabkan oleh faktor cuaca yang telah memasuki musim hujan, sehingga memengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan.

Bupati Subandi menyayangkan masih ditemu-

kannya deviasi pada sejumlah proyek infrastruktur. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pekerjaan akan berdampak pada kontraktor, khususnya terkait sanksi denda apabila proyek tidak selesai tepat waktu.

"Kalau tidak tepat waktu, kasihan juga para kontraktor karena harus membayarkan denda. Yang terpenting bagi kami bukan menerima den-

da, tetapi pekerjaan selesai sesuai jadwal," tegasnya.

Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa ketepatan waktu penggerjaan sangat penting agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar proyek. Dengan selesainya pembangunan tepat waktu, roda perekonomian warga dapat terus berjalan tanpa hambatan.

"Jika proyek selesai se-

suai target, aktivitas warga tidak terganggu dan perkonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi besar terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merencanakan langkah-langkah strategis dan efisien, termasuk dalam proses pemilihan kontraktor, agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki manfaat besar bagi masyarakat, baik dari sisi kelancaran mobilitas maupun peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih optimal demi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sidoarjo. (Khol/Fs)



POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jelang Akhir Tahun, Bupati Subandi Sidak Infrastruktur di Bringinbendo dan Trosobo

SIDOARJO (BM) - Mendekati akhir tahun, Bupati Sidoarjo Subandi terus memantau proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Berusaha melihat langsung untuk memastikan proyek berjalan sebagaimana diharapkan, dan selesai tepat waktu.

Seperi yang dilakukan di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Minggu (14/12). Bupati Subandi turun melakukan sidak untuk melihat proyek betonisasi jalan dan pembangunan jembatan crossing saluran air yang ada di sana.

Dalam sidak betonisasi di Desa Bringinbendo, Bupati mendapatkan

adanya keterlambatan pembangunan dengan deviasi mencapai 22% dari target. Padahal sisa waktu pengerjaan tinggal 13 hari lagi.

Sementara saat melakukan sidak terhadap proyek pembangunan jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo, Bupati Subandi juga menemukan keterlambatan dengan deviasi 20% dan sisa waktu pengerjaan kurang dari 7 hari.

Dari hasil evaluasi di lapangan, keterlambatan pada kedua proyek tersebut disebabkan oleh faktor cuaca yang telah memasuki musim hujan,

sehingga memengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan.

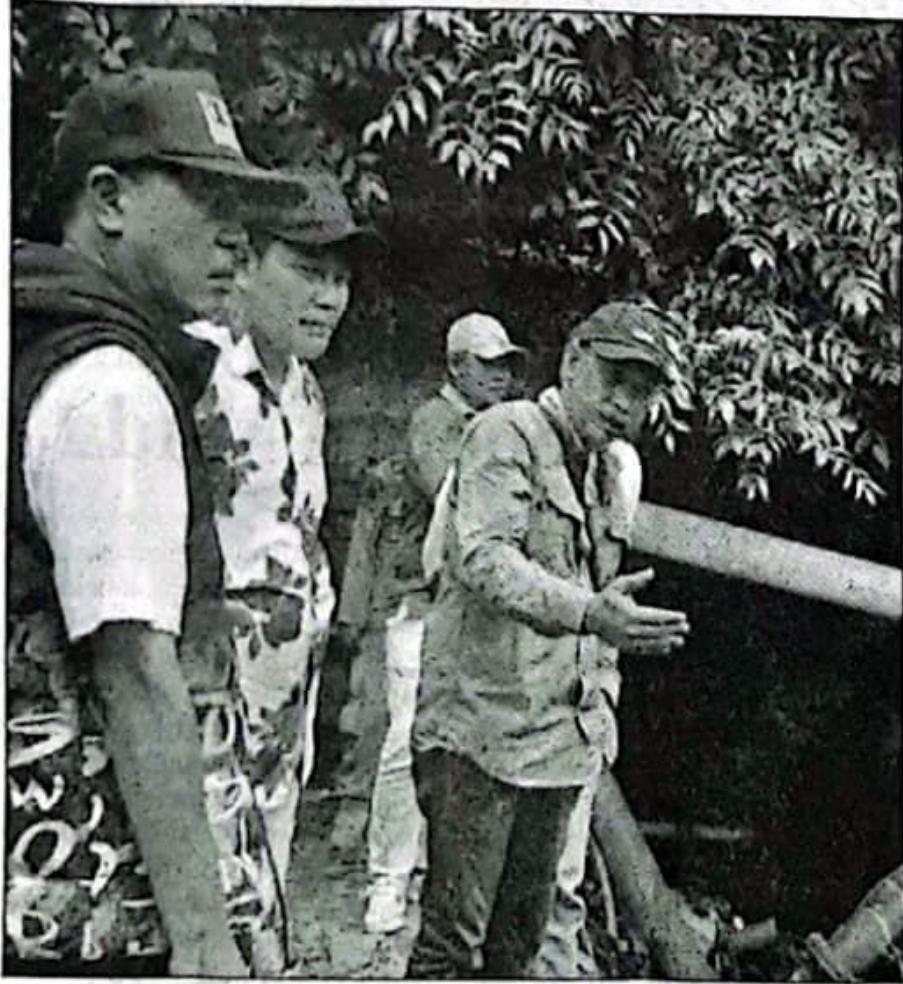
Bupati Subandi menyayangkan masih ditemukannya deviasi pada sejumlah proyek infrastruktur. Ia mengakui bahwa keterlambatan pekerjaan akan berdampak pada kontraktor, khususnya terkait sanksi denda apabila proyek tidak selesai tepat waktu.

"Kalau tidak tepat waktu, kasihan juga para kontraktor karena harus membayar denda. Yang terpenting bagi kami bukan menerima denda, tetapi pekerjaan selesai sesuai jadwal," tegasnya.

Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa ketepatan waktu pengerjaan sangat penting agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar proyek. Dengan selesainya pembangunan tepat waktu, roda perekonomian warga dapat terus berjalan tanpa hambatan. "Jika proyek selesai sesuai target, aktivitas warga tidak terganggu dan perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi besar terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merencanakan langkah-langkah strategis dan efisien, termasuk dalam proses pemilihan kontraktor, agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki manfaat besar bagi masyarakat, baik dari sisi kelancaran mobilitas maupun peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih optimal demi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sidoarjo. (udi)



BANTEN

SIDAK: Bupati Sidoarjo Subandi saat memantau proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidak dan Tegur Proyek Terlambat

Arjuna-Welirang



PENDAKIAN - Suasana jalan pendakian Gunung Arjuno ke Trenggalek. Sering dengan cuaca ekstrem, jalur pendakian ke Arjuno-Welirang ditutup, dan rencananya dibuka kembali pada Maret 2025. Dok/Latu

Jalur Pendakian Ditutup

BATU - Pendakian Gunung Arjuno dan Gunung Welirang ditutup sejak pertengahan November 2025 lalu.

Penyebabnya karena cuaca ekstrem yang tiap kali muncul di wilayah Kota Batu dan sekitarnya.

Sehingga UPT Taurha Raden Soerjo memutuskan untuk menutup sementara seluruh jalur pendakian Gunung Arjuno dan Gunung Welirang hingga tahun depan.

Kasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan UPT Taurha Raden Soerjo, Sadrah Devi mengatakan, ada penyebab lain pendakian Arjuno-Welirang ditutup.

Selain cuaca ekstrem, karena saat ini masuk puncah musim hujan, juga sekaligus untuk pemilihan ekosistem.

Rara Ines - Rinah Gunadi Kasmid cest Panan

Bupati Ingatkan Ketepatan Waktu

SIDOARJO - Menje-

lang akhir tahun anggaran, Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung ke lapangan untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan sesuai target. Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekali guna evaluasi terhadap progres pekerjaan yang masih mengalami keterlambatan.

Sidak dilakukan di Kecamatan Taman, Minggu sore,(14/12/25), dengan meninjau proyek betonisasi jalan di Desa Bringinbendo serta pembangunan jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo.

Pada proyek betonisasi jalan di Desa Bringinbendo, Bupati Subandi menemukan adanya deviasi pekerjaan mencapai 22 persen dari target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai cukup serius mengingat sisanya waktu penggerjaan hanya tinggal 13 hari.

Sementara itu, pada proyek pembangunan jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo, keterlambatan juga masih terjadi dengan deviasi sekitar 20 persen. Padahal,

waktu pelaksanaan proyek tersebut tersisa kurang dari tujuh hari.

Dari hasil evaluasi di lapangan, keterlambatan pada kedua proyek tersebut disebabkan oleh faktor cuaca yang telah memasuki musim hujan sehingga berdampak pada proses pelaksanaan pekerjaan. Meski demikian, Bupati mengingatkan bahwa potensi hambatan seharusnya telah diperhitungkan sejak awal oleh pihak pelaksana.

Bupati Subandi menyayangkan masih ditemukannya proyek infrastruktur yang tidak berjalan sesuai rencana. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pekerjaan tidak hanya berdampak pada jadwal pembangunan, tetapi juga berpotensi merugikan kontraktor alih sahsih denda.

"Kalau sampai tidak tepat waktu, yang kasihan justru kontraktornya karena harus membayar denda. Bagi kami, yang terpenting bukan soal dendanya, tetapi pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal," tegasnya Minggu sore (14/12/25).

Menurutnya, ketepatan waktu



Bupati Sidoarjo sidak proyek terlambat di Bringinbendo-Trosobo Mirogo (14/12/25).

penyelesaian proyek sangat penting agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

Infrastruktur yang selesai tepat waktu akan mendukung kelancaran mobilitas dan menjaga perputaran perekonomian warga.

"Kalau proyek selesai sesuai target, aktivitas masyarakat tidak terganggu dan ekonomi tetap bisa

berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Subandi menyerahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk dalam peningkatan pen-

gawasan serta proses pemilihan kontraktor agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi.

Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dapat bekerja lebih profesional dan optimal sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo. • Loe

DUTA
BERITA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina,
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo

SELASA, 16 DESEMBER 2025 |

ECELAN: RP 3.000

Kanker Serviks Mengintai Perempuan, Dinkes Ajak Tes Skrining HPV DNA

KOTA-Ancaman kanker serviks masih menjadi bayangan serius bagi perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Meski penyakit ini dapat dicegah dan dideteksi sejak dini, cakupan skrining kanker leher rahim di daerah tersebut masih jauh dari target nasional.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo menunjukkan, dari ratusan ribu perempuan usia rentan, baru sebagian kecil yang telah menjalani pemeriksaan.

Pelaksana Tugas (Plit)

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, mengungkapkan bahwa kanker serviks hingga kini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada perempuan di dunia.

"Kanker serviks sering kali baru terdeteksi saat sudah berada pada stadium lanjut. Hal inilah yang menyebabkan angka kematian masih tinggi, padahal penyakit ini sebenarnya bisa dicegah dan ditemukan lebih awal melalui skrining," ujar dr. Lakhsmie kepada Radar Sidoarjo, Senin (15/12).

Berdasarkan data International Agency for Research on Cancer (IARC) WHO tahun 2023,

orang menjalani tindakan krioterapi di puskesmas, serta 406 orang dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

"Angka ini menunjukkan bahwa cakupan skrining kita masih sangat rendah. Padahal Kementerian Kesehatan menargetkan 90 persen perempuan usia 30–50 tahun sudah menjalani skrining kanker serviks pada tahun 2024."

jelasnya. "Sebagai upaya menekan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks, pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi Kanker Leher Rahim 2023–2030.

• Ke Halaman 10

**RADAR
SIDOARJO.ID**

Kanker Serviks...

Salah satu pilar utamanya adalah peningkatan skrining dengan metode HPV DNA. Menurut dr. Lakhsmie, metode HPV DNA memiliki keunggulan dibandingkan Pap Smear.

"HPV DNA mendeteksi langsung keberadaan DNA virus HPV di leher rahim,

sedangkan Pap Smear melihat perubahan sel yang sudah mengalami kerusakan. Artinya, HPV DNA dapat mendeteksi risiko lebih dini sebelum berkembang menjadi kanker," terangnya.

Menambahkan, sekitar 99,7 persen kasus kanker serviks disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus (HPV). Pada perempuan yang aktif secara sek-

sual dan terinfeksi HPV, sekitar 75–80 persen dapat sembuh secara spontan. Namun, sekitar 10–25 persen mengalami infeksi HPV persisten yang berpotensi berkembang menjadi kanker.

"Rendahnya kesadaran masyarakat membuat banyak perempuan baru datang berobat saat kondisi sudah stadium lanjut. Pada tahap ini, respons ter-

hadap pengobatan menjadi kurang optimal," imbuhnya.

Dinkes Sidoarjo terus mendorong perempuan usia produktif untuk tidak takut menjalani skrining, terutama skrining HPV DNA yang kini mulai diperlukan. Selain itu, program vaksinasi HPV juga terus digencarkan sesuai RAN, meski saat ini masih difokuskan pada anak kelas 5 dan 6 SD serta kelas 3 SMP.

"Kami mengajak seluruh perempuan di Sidoarjo untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Deteksi dini adalah kunci utama. Jangan menunggu sakit, karena kanker serviks dapat dicegah dan disembuhkan jika ditemukan sejak awal," pungkasnya. (dik/vga)

**RADAR
SIDOARJO.ID**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



SURYANTO/RADAR SIDOARJO

KANTOR BARU: Warga mengurus administrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

Kantor Samsat Krian Pindah ke Trosobo

TAMAN-Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Krian resmi dipindahkan ke Samsat Trosobo yang berlokasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Peralihan layanan administrasi tersebut mulai diberlakukan sejak Senin (15/12). Seluruh pelayanan utama yang sebelumnya berada di Krian kini terpusat di Samsat Trosobo.

Kasubnit Regiden Polresta Sidoarjo sekaligus Paur Samsat, Iptu Arief Sulaiman, mengatakan bahwa pe-

mindahan ini mencakup seluruh jenis layanan Samsat.

"Iya, sudah dialihkan semua. Jadi pelayanan Samsat yang sebelumnya di Krian sekarang terpusat di Trosobo," ujarnya.

Menurut Arief, pemindahan kantor Samsat dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain dinilai lebih strategis, lokasi Samsat Trosobo juga memiliki area yang

● Ke Halaman 10

 **RADAR
SIDOARJO.ID**

Kantor Samsat Krian...

lebih luas serta akses yang lebih mudah dijangkau.

"Ini untuk perluasan pelayanan. Rencana pemindahan sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu."

"Trosobo lebih terjangkau dan tanpa-

pertemuan. Kini, bangunan tersebut telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan publik. "Bangunannya lebih besar dan area parkirnya juga lebih luas," tambah Arief.

Dari sisi fasilitas, Samsat Trosobo

diperbaik oleh Subbag Persidangan,

Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo.

Gedung Samsat Trosobo merupakan bangunan eks Graha Lorena yang sebelumnya difungsikan sebagai gedung

untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Fasilitas ini belum tersedia saat pelayanan masih berada di Krian.

"Kalau dulu di Krian hanya walk thru. Sekarang di Trosobo sudah ada drive thru untuk roda dua dan roda empat. Untuk layanan walk thru masih akan dievaluasi ke depannya," ungkapnya.

Arief mengakui, pada masa awal peralihan masih terdapat masyarakat yang kebingungan terkait lokasi pe-

layanannya. Untuk itu, pihaknya sering melakukan sosialisasi agar warga

mengetahui perubahan tersebut.

"Kami masih dalam tahap sosialisasi

dan terus memberikan informasi kepada masyarakat. Warga yang sebelumnya mengurus di Krian sekarang kami arahkan ke Trosobo, Kecamatan Taman," katanya.

Sementara itu, Kantor Samsat Krian tidak sepenuhnya ditutup. Lokasi tersebut nantinya akan difungsikan sebagai

tempat penyampaian surat pengesahan melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

"Untuk Samsat Krian akan menjadi

payment point. Selain itu, layanan Samsat keliling di wilayah Krian tetap berjalan seperti biasa," terangnya.

Dengan adanya pemindahan ini, Arief menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi kendaraan bermotor, termasuk pengurusan pelat nomor dan BPKB, kini terpusat di Trosobo.

"Untuk pengurusan pelat dan BPKB semuanya dilakukan di Samsat Trosobo," pungkasnya. (sur/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KOMPAK: Salah satu tim Marching Band saat tampil di JDCC 2025.

22 Tim Marching Band Ikuti Kompetisi Jayandaru Drum

KOTA-Sebanyak 22 tim marching band dan 25 peserta individu adu skill dalam kompetisi marching Jayandaru Drum Corps Competition (JDCC) 2025, yang digelar di GOR Delta Sidoarjo, Minggu (14/12/2025).

Kompetisi marching band ini diselenggarakan oleh Indonesia Drum Corps Association (IDCA) Kabupaten Sidoarjo.

Ketua Umum IDCA Kabupaten Sidoarjo, Mirsha Sondaram Situmoranggih, menjelaskan,

JDCC tahun 2025 di gelar bertujuan untuk

mengembangkan bakat anak di bidang musik, khususnya marching band dan drum corps.

Dijelaskan Mirsha, kompetisi JDCC 2025 diikuti oleh 22 tim marching band, dengan total personel sebanyak 1.200 orang. Sedangkan peserta individu, sebanyak 25 orang.

Kompetisi marching band ini tidak hanya diikuti peserta dari Sidoarjo, namun juga dari luar kota. Diantaranya Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Jember dan Probolinggo.

● Ke Halaman 10

 **RADAR
SIDOARJO.ID**

22 Tim Marching...

Para peserta itu mengikuti divisi Soundsport dengan klasemen mulai Kids Pemula, Kids Utama, Junior Pemula dan Junior Utama serta Umum.

Ada juga divisi Drum Battle dengan klasemen Umum. Sedangkan peserta individu, mengikuti Individual Contest Battery, Individual Contest Field Commander dan Individual Contest Drum Major.

Ia menjelaskan, JDCC 2025 mendapat sambutan antusias dari masyarakat di Jawa Timur. Sebab kelas peserta bertambah dibanding event serupa pada tahun 2024.

"Jangkauan peserta luar kota bertam-

bah signifikan. Jumlah penonton yang melihat kompetisi marching band ini juga bertambah," jeltreh Mirsha.

Event ini mendapat dukungan makasimal dari produsen alat musik. "Alhamdulillah event kali ini, kami dapat

support luar biasa dari para produsen alat musik," tandas Mirsha.

Sehingga selain tropi dan piagam penghargaan, para juara JDCC 2025 juga disiapkan hadiah berupa alat musik marching band. (dk/vga)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

 **RADAR
SIDOARJO.ID**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Proyek Crossing Saluran Air Trosobo Ditarget Rampung 20 Desember 2025

TAMAN-Pihak kontraktor pelaksana proyek crossing saluran air di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, menargetkan pekerjaan rampung paling cepat pada Sabtu, 20 Desember 2025. Penyelesaian proyek tersebut mengalami keterlambatan sehingga waktu pengerjaan diperpanjang dari jadwal semula.

Proyek crossing saluran air yang sempat menuai keluhan masyarakat akibat molornya pengerjaan kini diklaim telah mencapai progres sekitar 80 persen. Koordinator Pelaksana I proyek, Agung, menyampaikan bahwa secara teknis pengerjaan utama hampir selesai.

Ia menjelaskan, proses pengecoran serta konstruksi bagian bawah saluran telah rampung. Namun, sejumlah kendala



BELUM RAMPUNG: Proyek pelebaran jembatan di Jalan Raya Trosobo, Taman, masih dalam tahap pengerjaan.

di lapangan membuat penyelesaian proyek belum dapat dipercepat secara

signifikan.

"Untuk pengecoran sudah selesai, bagian bawah

juga sudah selesai. Namun, tanggul tanah yang terhubung dengan badan

aspal mengalami jebol," ujar Agung, Senin (15/12).

Menurut Agung, jebolnya tanggul tanah tersebut memaksa pihak kontraktor melakukan penanganan tambahan. Kondisi itu sempat menyebabkan aliran air meluap dan menimbulkan genangan cukup tinggi di kawasan permukiman sekitar.

"Air sempat naik hampir setengah meter dan menggenangi perumahan, termasuk di wilayah Citra Harmoni dan sekitarnya. Karena itu, kami merencanakan penataan total pada bagian pelimpahan air, baru setelah itu menutup bagian depan selama satu hari," jelasnya.

Selain kendala teknis, faktor cuaca disebut menjadi tantangan utama dalam percepatan pekerjaan. Menurut Agung,

• Ke Halaman 10



Proyek Crossing Saluran...

hujan dengan durasi singkat saja dapat meningkatkan debit air secara signifikan.

"Kalau satu hari tidak hujan, pengerjaan relatif aman. Namun, hujan sekitar setengah jam saja, air sudah hampir di atas double U-box. Kedalaman DUB sekitar 4,5 meter, sementara ke-

tinggian air sungai bisa naik hingga 3 meter," ungkapnya.

Dengan progres yang telah mencapai 80 persen dan seluruh peralatan utama telah terpasang, pihak kontraktor optimistis proyek crossing tersebut dapat diselesaikan sesuai target.

"Jika kondisi cuaca mendukung, paling cepat tanggal 20 Desember 2025 pekerjaan sudah selesai," pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan tetap mencatat keterlambatan proyek tersebut sebagai bahan evaluasi ke depan. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPS Catat Angka Kemiskinan di Sidoarjo Menjadi Menurun

Sidoarjo, Bhirawa

Program Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi masalah kemiskinan , pada periode 2024- 2030, mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 4.40 % per Maret 2025 ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo mencatat angka ini mengalami penurunan sebesar 0.13 poin, dari waktu yang sama pada Maret 2024 lalu, yang saat itu sebesar 4.53%

Kepala BPS Sidoarjo, M.Ismail, men-

gatakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, tidak lepas karena ada sejumlah program -program prioritas yang dilakukan.

Se -
perti
pro -
gram
makan
gratis bagi
arga mis-

kin dan Lanjut usia, serta penciptaan 100.000 lapangan kerja baru yang ditargetkan oleh Pemkab Sidoarjo.

“Program -program prioritas ini telah mampu mengurangi angka

► ke halaman 11



M.Ismail

Kepala BPS Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

BPS Catat Angka Kemiskinan di Sidoarjo Menjadi Menurun

● Sambungan hal 1

kemiskinan, semoga terus membaik," komentar M.Ismail, belum lama ini.

Selain itu, juga ada program prioritas lainnya, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga miskin di Kabupaten Sidoarjo, yang sampai saat ini masih terus berjalan.

"Program -program Pemkab Sidoarjo itu cukup strategis, dalam mampu mengurangi angka kemiskinan," komentarnya.

Pihak BPS Sidoarjo, kata M.Ismail, mencatat dan menyimpulkan, kalau perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo itu, telah menjadi sebuah indikasi keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan.

Profil kemiskinan yang ditunjukkan oleh BPS Sidoarjo itu, kata M.Ismail, semoga dapat mendukung perumusan kebijakan yang bermanfaat bagi Pemkab Sidoarjo, untuk pengolahan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

"Agar nantinya bisa tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, BPS Sidoarjo juga memberi masukan agar melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, supaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo bisa cepat tuntas dan bisa terus berkelanjutan. [kus.gat]



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Dengan adanya *big tree*, alun-alun tidak hanya terang dan aman. Tetapi juga menarik untuk dikunjungi saat malam hari."

Bahrul Amig
Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
dan Kebersihan
Sidoarjo

Lampu Hias Tujuh Meter Percantik Alun-Alun

Ikon Baru Kota Delta

SIDOARJO – Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo hampir rampung. Saat ini, pembangunan ruang terbuka hijau itu memasuki tahap pemasangan lampu berbentuk *big tree* atau pohon besar. Lampu hias setinggi tujuh meter itu bakal menjadi ikon baru alun-alun.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Bahrul Amig mengatakan satu *big tree* sudah cukup memberi kesan meriah. "Bakal cantik

saat malam," ujarnya kemarin (15/12). Pemasangan hanya satu agar tidak memakan banyak space.

Menurut Amig, progres pembangunan alun-alun saat ini telah mencapai 90 persen. Beberapa pekerjaan sudah memasuki tahap finishing. Seperti pemasangan keramik dan paving yang saat ini sedang didorong supaya lebih cepat.

Selain itu, lampu-lampu hias di internal dan pengaspalan jalan sisi utara juga sedang mulai dikerjakan. Semua tahap diharapkan

rampung beberapa hari ke depan. Sehingga alun-alun bisa segera dinikmati masyarakat.

"Dengan adanya *big tree*, alun-alun tidak hanya terang dan aman. Tetapi juga menarik untuk dikunjungi saat malam hari," ujar Amig. Lampu hias tersebut diharapkan menjadi ikon baru yang memikat pengunjung. Sehingga suasana kota semakin modern dan estetik. (ful/hen)

IKONIK: Lampu hias berbentuk pohon besar dipasang di tengah alun-alun kemarin (15/12).



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



UBAH
FUNGSI:
Lapangan
Sidokare
seluas 4.000
meter persegi
yang akan
dibangun
bozem.

ANGGER BONDANI/JAWA POS

Pemkab Bongkar Lapangan Sidokare Jadi Bozem

Tangani Banjir Tengah Kota

SIDOARJO – Perlu solusi agar kawasan tengah kota tak dilanda banjir lagi. Salah satu upaya yang dilakukan pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo yakni mengubah lapangan bola di Sidokare jadi bozem untuk penampungan air.

Saat ini, kebutuhan kolam memang kurang. Hanya ada satu bozem di perkotaan yakni di kawasan Sekardangan. Pembangunan kolam air kebutuhan mendesak dalam menangani genangan.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, rencana tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem bozem perkotaan. Langkah ini juga disiapkan sebagai upaya pengendalian banjir di wilayah Sidokare dan seki-

tarnya. "Sudah disetujui DP-RD," katanya kemarin (15/12).

Luas 4.000 Meter Persegi

Dwi mengungkapkan, pembangunan akan masuk tahap perencanaan tahun anggaran 2026. Sebelum digarap, Pemkab akan melakukan feasibility study (FS) untuk memastikan kelayakan teknis dan manfaat dari pengubahan fungsi lapangan tersebut. Kajian tersebut penting untuk memastikan bozem mampu menampung limpaan air secara optimal.

Lapangan bola di Sidokare memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi lebih. Dengan luasan tersebut, bozem diharapkan dapat berperan signifikan dalam mengurangi debit air yang masuk ke Sungai Sidokare saat curah hujan tinggi.

Solusi Jangka Panjang

Sementara itu, bozem yang telah terbangun di kawasan

PEMBANGUNAN BOZEM DI SIDOKARE

- Bozem dibangun di Lapangan Sidokare
- Luasnya 4.000 meter persegi
- Masuk kajian FS tahun 2026
- Pembangunan bozem dilakukan untuk mencegah banjir di Sidokare dan sekitarnya



Sumber: berbagai informasi

Sekardangan juga dioptimalkan. DPUBMSDA telah melakukan normalisasi untuk memaksimalkan daya tampung air. "Pekan lalu sudah kami lakukan normalisasi pengeringan dan penambalan," ujarnya.

Dalam dua bulan terakhir banjir sudah tiga kali menggenangi wilayah Sidoarjo kota. Pengembangan bozem menjadi salah satu solusi jangka panjang pengendalian banjir. "Kami berharap dengan tambahan bozem di Sidokare, beban aliran air di tengah kota bisa berkurang," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

INFRASTRUKTUR

Perbaikan SDN Kedungsugo 1 Mulai Tahun Depan

SIDOARJO – Perbaikan SDN Kedungsugo 1 Kecamatan Prambon yang rusak akibat angin kencang Rabu (10/12) belum klir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi menegaskan jika instansinya berupaya mempercepat perbaikan. Namun, hal tersebut pupus karena anggaran tahun ini sudah tutup.

Menurut Tirto, perbaikan baru bisa dilakukan tahun 2026. "Kalau anggaran 2025 tidak memungkinkan," katanya. Meski begitu perbaikan darurat bisa saja menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). "Saya masih akan konsultasi dengan bupati," katanya.

Tim Sarpras Dispendikbud diketahui telah mengecek kondisi sekolah. Akan tetapi hingga kini, mereka belum bisa menentukan besaran biaya perbaikan.

Plt Kepala SDN Kedungsugo 1 Sukartono memastikan aktivitas belajar siswa tetap berjalan meski kondisi bangunan tidak ideal. "Anak-anak tidak mempermasalahkan meskipun belajar di teras," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran semester ini sebenarnya sudah selesai. Saat ini siswa tinggal mengikuti ujian sebelum pembagian rapor. Setelah itu sekolah akan masuk masa libur mulai 22 Desember. Sekolah tetap berharap perbaikan segera dikerjakan. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

JUARA:
Kepala
Madrasah
Ibtidaiyah
Bilingual
Ma'arif
Ketegan
Umi Salamah
memper-
lihatkan
penghargaan
yang
didapat dari
Kemenag.



DOK. UMI SALAMAH

Sukses Kembangkan Pembelajaran Internasional di Madrasah Pelosok

SIDOARJO – Lokasinya boleh di pelosok. Namun soal pembelajaran harus maju dan berstandar internasional. Visi tersebut dimiliki Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bilingual Ma'arif Ketegan Umi Salamah saat memimpin lembaganya. Berkat inovasinya, dia berhasil meraih Juara 2 Kepala Madrasah Inspiratif Tingkat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Alumnus Universitas Gontor itu meraih prestasi setelah melalui tahapan seleksi panjang. "Saya terdorong mengikuti kompetisi itu untuk mendorong guru-

guru di MI Bilingual Ma'arif Ketegan untuk mau maju," katanya kemarin (15/12).

Inovasi yang diikutkan kompetisi yaitu "Mentransformasi Madrasah Sederhana Menuju Madrasah Bertaraf Internasional". Inovasi selaras dengan perjuangannya mengubah MI yang berada di pelosok Tanggulangin untuk bisa memiliki pembelajaran berstandar internasional.

Umi mulai berkompetisi dari ajang Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tingkat Kabupaten hingga akhirnya menang pada malam penganugerahan peringatan Hari Guru Nasional Kemenag RI di Jakarta, Sabtu (6/12). (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DBD Bertambah, Dinkes Imbau Masyarakat Waspada

413 Kasus hingga
12 Desember

SIDOARJO—Dinkes Sidoarjo mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD). Sebab jumlah kasus tahun ini lebih tinggi dibanding 2024. Sebagai solusi, masyarakat diminta aktif memberantas sarang nyamuk.

Berdasar data, ada 379 kasus DBD sepanjang 2024. Sedangkan selama Januari-12 Desember 2025 tercatat 413 kasus. Dua pasien DBD meninggal dunia tahun ini.

Dinkes mencatat kasus tertinggi Mei dengan 70 kasus, disusul April 66 kasus dan Februari 65 kasus. Sementara Januari ada 54 kasus, Maret 58 kasus dan Juni 40 kasus. Kasus turun pada Juli yang hanya 18 kasus dan terus berkurang hingga Desember.

Pencegahan Harus Konsisten

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PENCEGAHAN: Dinkes menggencarkan pemberantasan sarang nyamuk dengan fogging seiring meningkatnya kasus DBD tahun ini.



Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten."

dr Djoko Setijono

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sidoarjo

(P2P) Dinkes Sidoarjo dr Djoko Setijono mengatakan kasus mengalami tren penurunan dari bulan ke bulan. Namun DBD tetap mendapat perhatian serius. "Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten," katanya.

Menurut Djoko, penanganan DBD tidak bisa hanya dilakukan saat kasus meningkat. Pencegahan melalui pemberantasan sarang nya-

muk dinilai lebih efektif untuk menekan penularan.

Djoko mendorong masyarakat menerapkan gerakan 3M plus seperti menguras dan menutup tempat penampungan air. Selain itu, barang bekas yang tidak terpakai harus dimanfaatkan agar tidak menjadi sarang nyamuk. "Yang pasti keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama pengendalian," tambah Djoko. (ful/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kantor Samsat Krian Pindah ke Trosobo

SIDOARJO - Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Krian resmi pindah ke Desa Trosobo, Kecamatan Taman

BARU BUKA: Kantor Samsat di Trosobo mulai didatangi masyarakat yang mengurus pajak kendaraan kemarin (15/12).

mulai kemarin (15/12). Pemindahan tersebut dilakukan untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan kualitas layanan pajak kendaraan bermotor.

Kasubunit Regident Polresta Sidoarjo Iptu Arif Sulaiman mengatakan,

pemindahan layanan samsat ke Trosobo ini merupakan bagian dari rencana pengembangan pelayanan yang disiapkan sejak dua tahun terakhir. Arif mengatakan lokasi Samsat Trosobo menggunakan Gedung eks Graha Loreksa.

"Luas bangunannya sendiri 900 meter persegi," katanya.

Menurut Arif, samsat di Trosobo juga dilengkapi layanan drive thru untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang sebelumnya belum tersedia di Krian. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kejaksaan Negeri Sidoarjo Bersama Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan Pidana Kerja Sosial



Kejaksaan Negeri Sidoarjo Bersama Pemkab Sidoarjo Siap Terapkan Pidana Kerja Sosial

KOMINFO Sidoarjo— Pidana kerja sosial resmi diberlakukan di Kabupaten Sidoarjo. Penerapan pidana kerja sosial itu juga akan diberlakukan di seluruh daerah di Jawa Timur. Pagi tadi, seluruh kepala Kejaksaan Negeri di Jawa Timur bersama bupati, wali kota se-Jawa Timur menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pidana Kerja Sosial di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Senin (15/12). Salah satunya Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kepala Kejari Sidoarjo Zaidar Rasepta yang juga hadir.

Penandatanganan PKS dilakukan bersamaan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana. Dalam kesempatan itu juga diselenggarakan Bimbingan Teknis Capacity Building yang dibuka oleh Jampidum Asep Nana Mulyana.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut baik PKS Pidana Kerja Sosial tersebut. Pemkab Sidoarjo akan menyediakan tempat, sarana, dan kegiatan kerja sosial sesuai PKS yang telah ditandatangani bersama. Dikatakannya kegiatan kerja sosial yang akan diberikan bersifat edukatif serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita pastikan kerja sosial yang akan kita berikan tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia,” ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi juga mengatakan Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pembinaan terhadap terpidana yang sedang menjalankan pidana kerja sosial. Selain itu dirinya akan menjamin keamanan terpidana selama menjalani masa hukumannya.

“Kita akan menunjuk OPD terkait untuk melakukan pembinaan dan menjamin keamanan terpidana selama menjalani masa hukumannya,” ucapnya.



DPRD Sidoarjo Sampaikan Capaian Kinerja Selama 2025, Salah Satunya Perda Fasilitasi Pesantren



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Selama tahun 2025 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan 11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya Perda Fasilitasi Pesantren yang merupakan inisiatif dari DPRD Sidoarjo.

“Penyampaian kinerja ini sebagai wujud komitmen DPRD terhadap transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna pada Senin (15/12/2025).

Suyarno mengatakan bahwa laporan kinerja DPRD Sidoarjo ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan evaluasi atas tugas-tugas legislatif selama tahun 2025.

Selama tahun 2025 ini, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) telah menyelesaikan atau mengesahkan 11 Perda yang terdiri dari satu Perda inisiatif DPRD Sidoarjo dan 10 diantaranya usulan dari eksekutif.

“Perda inisiatif dari DPRD Sidoarjo, yaitu Perda Fasilitasi Pesantren,” katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang telah dihasilkan DPRD Sidoarjo dalam bentuk berita acara persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sebanyak 28 berita acara dan 3 keputusan pimpinan DPRD Sidoarjo.

“Keputusan DPRD Sidoarjo sebanyak 28 keputusan dan Perda yang sudah diselesaikan sebanyak 6 Perda,” sampainya.

Tidak hanya itu saja, DPRD Sidoarjo juga telah melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sebanyak tiga kali, yaitu di Bulan Maret, Juli dan Oktober 2025.

“Reses ini dilakukan oleh setiap anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan guna menyerap aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.

DPRD Sidoarjo telah banyak menyampaikan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD), diantaranya Komisi A sebanyak 16 kali rapat, Komisi B 13 kali, Komisi C 11 kali, Komisi D 21 kali dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebanyak 13 kali rapat. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka atas setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada legislatif.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sepanjang 2025, DPRD Sidoarjo Selesaikan 11 Raperda



Liputan5news.com - Sidoarjo, DPRD Kabupaten Sidoarjo memaparkan hasil kerja lembaga legislatif selama tahun 2025. Sejumlah agenda strategis berhasil dituntaskan, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pelaksanaan fungsi pengawasan melalui rapat alat kelengkapan dewan.

Paparan kinerja tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (15/12/2025). Rapat itu turut dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi serta puluhan anggota dewan.

Menurut Suyarno, laporan capaian kinerja menjadi bentuk keterbukaan DPRD kepada publik sekaligus komitmen dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

"Ini merupakan wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat, sekaligus bagian dari evaluasi pelaksanaan tugas DPRD sepanjang 2025," ujar Suyarno.

Dari sisi legislasi, DPRD Sidoarjo mencatat telah memutuskan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda). Dari jumlah tersebut, satu Raperda merupakan usulan DPRD, sementara 10 lainnya berasal dari pemerintah daerah.

Raperda inisiatif DPRD adalah tentang Fasilitasi Pesantren," jelas politisi PDIP itu.

Selain pengesahan Raperda, DPRD juga menghasilkan berbagai produk hukum lain. Tercatat sebanyak 28 berita acara persetujuan dan kesepakatan bersama, tiga keputusan pimpinan DPRD, serta 28 keputusan DPRD selama 2025.

Ia menambahkan, enam Raperda di antaranya telah dirampungkan hingga tahap akhir pembahasan dan penetapan. Tak hanya di bidang legislasi, DPRD Sidoarjo juga menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Sepanjang 2025, reses dilaksanakan tiga kali, yakni pada Maret, Juli, dan Oktober.

"Setiap anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan aspirasi warga," ungkapnya.

Aktivitas rapat alat kelengkapan dewan (AKD) juga menjadi bagian dari laporan kinerja. Komisi A tercatat menggelar 16 kali rapat, Komisi B 13 kali, Komisi C 11 kali, Komisi D 21 kali, serta Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) sebanyak 13 kali rapat. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan bahwa lembaga legislatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

"Setiap aspirasi yang masuk akan langsung kami teruskan ke komisi terkait agar segera ditindaklanjuti," ujar pria yang akrab disapa Cak Nasih.

Ia menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan seluruh masukan masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku. (Yanti)

Bupati Sidoarjo : Ketepatan Waktu Lebih Penting daripada Denda Proyek



Sidoarjo, eksklusif.co.id – Mendekati akhir tahun, Bupati Sidoarjo Subandi terus memantau proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Berusaha melihat langsung untuk memastikan proyek berjalan sebagaimana diharapkan dan selesai tepat waktu. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Minggu (14/12/2025).

Bupati Subandi turun melakukan sidak untuk melihat proyek betonisasi jalan dan pembangunan jembatan crossing saluran air yang ada di sana. Dalam sidak betonisasi di Desa Bringinbendo, Bupati mendapati adanya keterlambatan pembangunan dengan deviasi mencapai 22% dari target.

Padahal sisa waktu penggeraan tinggal 13 hari lagi. Sementara saat melakukan sidak terhadap proyek pembangunan jembatan crossing saluran air di Desa Trosobo.

Bupati Subandi juga menemukan keterlambatan dengan deviasi 20% dan sisa waktu penggeraan kurang dari 7 hari. Dari hasil evaluasi di lapangan, keterlambatan pada kedua proyek tersebut disebabkan oleh faktor cuaca yang telah memasuki musim hujan. Sehingga memengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan.

Bupati Subandi menyayangkan masih ditemukannya deviasi pada sejumlah proyek infrastruktur. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pekerjaan akan berdampak pada kontraktor khususnya terkait Adanya sanksi denda apabila proyek tidak selesai tepat waktu.

"Kalau tidak tepat waktu, kasihan juga para kontraktor karena harus membayar denda."

Yang terpenting bagi kami bukan menerima denda, tetapi pekerjaan selesai sesuai jadwal," tegasnya. Lebih lanjut, Subandi menekankan bahwa ketepatan waktu penggeraan sangat penting. Agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar proyek. Dengan selesainya pembangunan tepat waktu, roda perekonomian warga dapat terus berjalan tanpa hambatan.

"Jika proyek selesai sesuai target, aktivitas warga tidak terganggu dan perekonomian masyarakat bisa tetap berjalan dengan baik," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Akan melakukan evaluasi besar terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merencanakan langkah-langkah strategis dan efisien, termasuk dalam proses pemilihan kontraktor.

Agar permasalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Baik dari sisi kelancaran mobilitas maupun peningkatan perekonomian. Oleh karena itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih optimal demi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sidoarjo."Jelasnya. (Ali)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Sampaikan Capaian Kinerja Selama 2025, Salah Satunya Perda Fasilitasi Pesantren



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Selama tahun 2025 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo telah menyelesaikan 11 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya Perda Fasilitasi Pesantren yang merupakan inisiatif dari DPRD Sidoarjo.

"Penyampaian kinerja ini sebagai wujud komitmen DPRD terhadap transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Suyarno, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna pada Senin (15/12/2025).

Suyarno mengatakan bahwa laporan kinerja DPRD Sidoarjo ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan evaluasi atas tugas-tugas legislatif selama tahun 2025.

Selama tahun 2025 ini, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) telah menyelesaikan atau mengesahkan 11 Perda yang terdiri dari satu Perda inisiatif DPRD Sidoarjo dan 10 diantaranya usulan dari eksekutif.

"Perda inisiatif dari DPRD Sidoarjo, yaitu Perda Fasilitasi Pesantren," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyampaikan bahwa ada beberapa produk hukum yang telah dihasilkan DPRD Sidoarjo dalam bentuk berita acara persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sebanyak 28 berita acara dan 3 keputusan pimpinan DPRD Sidoarjo.

"Keputusan DPRD Sidoarjo sebanyak 28 keputusan dan Perda yang sudah diselesaikan sebanyak 6 Perda," sampainya.

Tidak hanya itu saja, DPRD Sidoarjo juga telah melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sebanyak tiga kali, yaitu di Bulan Maret, Juli dan Oktober 2025.

"Reses ini dilakukan oleh setiap anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan guna menyerap aspirasi dari masyarakat," ungkapnya.

DPRD Sidoarjo telah banyak menyampaikan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD), diantaranya Komisi A sebanyak 16 kali rapat, Komisi B 13 kali, Komisi C 11 kali, Komisi D 21 kali dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) sebanyak 13 kali rapat. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menuturkan bahwa pihaknya sangat terbuka atas setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada legislatif.

Dituturkan oleh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo itu bahwa selama ini setiap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Sidoarjo langsung ditindaklanjuti oleh setiap komisi yang bersangkutan.

"Jika ada permasalahan atau aspirasi dari masyarakat kami langsung disposisikan ke komisi masing-masing untuk ditindaklanjuti," tuturnya. (mams)



Perombakan OPD Dimulai, Bupati Sidoarjo Subandi Ajukan Perubahan Perda



Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan nota penjelasan usulan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo Senin (15/12/2025).

Bupati Subandi menjelaskan, perubahan Perda dilakukan untuk menyesuaikan regulasi terbaru dan kondisi pemerintahan saat ini. Penyesuaian tersebut bertujuan agar tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan lebih efektif.

"Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kondisi terkini," kata Subandi di hadapan 31 anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Ia menyebutkan, salah satu perubahan menyangkut penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diusulkan berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Sidoarjo. Selain perubahan nama, struktur organisasi Baperida juga mengalami penyesuaian. Jumlah bidang bertambah dari empat menjadi lima bidang. Penambahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023.

"Penyesuaian struktur organisasi dilakukan agar perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi dapat berjalan optimal," ujar Subandi.

Perubahan nomenklatur juga diusulkan pada Badan Kepegawaian Daerah. BKD diubah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Usulan ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017.

Selain itu, Badan Pelaporan Pajak Daerah diusulkan berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidoarjo. Baca juga: [Manfaatkan Lahan Negara, Prabowo Perintahkan Percepatan Pembangunan Hunian Korban Bencana Dalam usulan perubahan Perda](#). Pemkab Sidoarjo turut menambahkan dua perangkat daerah baru. Keduanya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Bupati Subandi menyampaikan, penambahan dua perangkat daerah tersebut dilakukan karena sebelumnya belum terakomodasi dalam Perda yang berlaku.

"Penyusunan perubahan Perda ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ucapnya. "Harapannya, pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih prima," imbuhnya.

Usai penyampaian nota penjelasan, DPRD Sidoarjo membentuk Panitia Khusus (Pansus) III. Pansus ini bertugas membahas perubahan Rancangan Perda Nomor 11 Tahun 2016. Baca juga: [Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tindak Tegas Aparat Terlibat Penyalundupan SDA](#) Pansus III DPRD Sidoarjo diketuai Supriyono dari Fraksi Gerindra. Wakil Ketua dijabat M. Rafi Wibisono dari Fraksi PKB. Adapun anggota Pansus III terdiri dari Saifuddin Affandi, Elok Suciati, Atok Ashari, M. Rojik, Remontara Wahyudi, Didik Prasetyo, Choirul Hidayat, Anang Siswandoko, H. Bashor, Roki Wardoyo, M. Dian Felani, Afdal Muhammad Ihsan, serta Aditya Indra Putra Mualim. (*)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Masa Jabatan 2024-2029



Sidoarjo – Pada hari Senin (15/12/2025), DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Masa Jabatan 2024-2029 di ruang paripurna.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Suyarmo menyampaikan bahwa hari ini merupakan rapat paripurna masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025 yang dihadiri 31 anggota dewan, Bupati Sidoarjo, H. Subandi dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Laporan capaian kinerja pimpinan dewan disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Suyarmo. Penyampaian kinerja ini sebagai wujud komitmen DPRD terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Urainya, Suyarmo juga menambahkan laporan kinerja menjadi bentuk pertanggung jawaban moral sekaligus evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas legislatif selama tahun 2025.

Adapun kinerja Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), DPRD Sidoarjo telah menyelesaikan 11 Raperda. Rinciannya, satu Perda merupakan inisiatif atau usulan DPRD Sidoarjo, sedangkan 10 Raperda lainnya merupakan usulan dari pihak eksekutif. "Raperda inisiatif dari DPRD Sidoarjo yaitu Raperda Fasilitasi Pesantren," ucapnya.

Selain itu, DPRD Sidoarjo juga menghasilkan produk hukum dalam bentuk berita acara persetujuan bersama dan kesepakatan bersama sebanyak 28 berita acara, serta tiga keputusan pimpinan DPRD Sidoarjo.

"Keputusan DPRD Sidoarjo sebanyak 28 keputusan dan Raperda yang sudah diselesaikan sebanyak enam Raperda," ungkapnya.

Di samping menetapkan keputusan dan Raperda, DPRD Sidoarjo juga telah melaksanakan kegiatan reses atau scrapping aspirasi masyarakat sebanyak tiga kali, yakni pada bulan Maret, Juli, dan Oktober 2025.

"Reses ini dilakukan oleh setiap anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat," jelasnya.

DPRD Sidoarjo juga mencatat pelaksanaan rapat-rapat oleh masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD). Rinciannya, Komisi A melaksanakan 16 kali rapat, Komisi B 13 kali rapat, Komisi C 11 kali rapat, Komisi D 21 kali rapat, serta Bapemperda sebanyak 13 kali rapat.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga legislatif.

- Lebih lanjut, Abah Nasih -sepaan akrabnya- mengatakan setiap aspirasi yang masuk ke DPRD Sidoarjo langsung ditindaklanjuti oleh komisi terkait. Jadi jika ada permasalahan atau aspirasi dari masyarakat, kami langsung mendisposisikan ke komisi untuk ditindaklanjuti punkasnya (dah/*)



Sidoarjo, [Arijunausantarane.com](http://arijunausantarane.com) - tuntaskan laporan kinerja Pimpinan DPRD Sidoarjo Tahun 2025. DPRD Kabupaten Sidoarjo memaparkan hasil kerja lembaga legislatif selama tahun 2025. Sejumlah agenda strategis berhasil dituntaskan, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pelaksanaan fungsi pengawasan melalui rapat alat kelengkapan dewan berlaku.

Paparan kinerja tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (15/12/2025). Rapat itu turut dihadiri Bupati Sidoarjo Subandi serta puluhan anggota dewan. Menurut Suyarno, laporan capaian kinerja menjadi bentuk keterbukaan DPRD kepada publik sekaligus komitmen dalam menjalankan prinsip akuntabilitas pemerintahan.

"Ini merupakan wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat, sekaligus bagian dari evaluasi pelaksanaan tugas DPRD sepanjang 2025," ujar Suyarno.

Dari sisi legislasi, DPRD Sidoarjo mencatat telah menuntaskan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda). Dari jumlah tersebut, satu Raperda merupakan usulan DPRD, sementara 10 lainnya berasal dari pemerintah daerah.

Raperda inisiatif DPRD adalah tentang Fasilitasi Pesantren," jelas politisi PDIP Perjuangan itu.

Tuntaskan laporan kinerja Pimpinan DPRD Sidoarjo Tahun 2025. Selain penceesahan Raperda, DPRD juga menghasilkan berbagai produk hukum lain. Tercatat sebanyak 28 berita acara persetujuan dan kesepakatan bersama, tiga keputusan pimpinan DPRD, serta 28 keputusan DPRD selama 2025. Ia menambahkan, enam Raperda di antaranya telah dirampungkan hingga tahap akhir pembahasan dan penetapan. Tak hanya di bidang legislasi, DPRD Sidoarjo juga menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Sepanjang 2025, reses dilaksanakan tiga kali, yakni pada Maret, Juli, dan Oktober.

"Setiap anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan aspirasi warga," ungkapnya.

Aktivitas rapat alat kelengkapan dewan (AKD) juga menjadi bagian dari laporan kinerja. Komisi A tercatat mengegelar 16 kali rapat, Komisi B 13 kali, Komisi C 11 kali, Komisi D 21 kali, serta

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) sebanyak 13 kali rapat. Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menegaskan bahwa lembaga legislatif membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

"Setiap aspirasi yang masuk akan langsung kami teruskan ke komisi terkait agar sesera ditindaklanjuti," ujar pria yang akrab disapa Cak Nasih.

Ia menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan seluruh masukan masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.